

Menjadikan PTIK sebagai Perguruan Tinggi yang Dibanggakan¹

Wik Djatmika²

Pendahuluan.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) - sebutan baru untuk Akademi Polisi yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1946 - setelah pindah ke Jakarta pada tanggal 1 September 1950. Bukan suatu kebetulan membuat pendidikan tinggi setingkat universitas karena para mahasiswa angkatan I dan II Akademi Polisi pada waktu itu adalah para tamatan sekolah setingkat Sekolah Lanjutan tingkat Atas pada masa Hindia Belanda, hanya seorang tamatan SMA pada jaman Jepang yakni mahasiswa Siswadji terakhir Wakapolri. Bahkan diantaranya pernah menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtschool*) seperti Subroto Brotodirdjo, Hugeng Imam Santosa. Oleh karena itu pemikiran para Pembina Akademi Polisi mengganti nama menjadi PTIK sekaligus membuat sistem pendidikannya menjadi pendidikan universitas seperti pendidikan pada universitas pada umumnya yang saat itu dengan tataran dari tingkat persiapan (*propaedeus*), kandidat dan doktoral yang diselesaikannya dalam waktu 5 tahun dan langsung mendapatkan derajat akademis dengan gelar sarjana (doktorandus). PTIK boleh dikatakan perguruan tinggi kedinasan tertua di Indonesia. Waktu tempuh yang panjang karena diisi dengan latihan dan praktek lapangan, sedangkan pada perguruan tinggi pada umumnya dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat

Pada tahun 1950 dibuka asupan pertama di Jakarta yaitu asupan angkatan III PTIK. Syarat yang ditentukan masih sama yakni syarat paling rendah telah memiliki ijazah setingkat dengan SMA atau yang disamakan seperti Sekolah Guru Atas dan lainnya. Sistem pendidikan yang dilaksanakan diteruskan sampai angkatan VII. Untuk membedakan dikemudian angkatan VIII tahun 1958, sampai tahun 1964 (angkatan XI) lewat program "bakaloreat" atau sarjana muda. Setelah tahun 1968 asupan masuk PTIK berasal dari AKPOL.

Dalam kurun waktu 10 tahun - dalam dekade 1950 - PTIK telah menerima asupan 6 kali yaitu angkatan III tahun 1950, angkatan IV tahun 1951, angkatan V pada tahun 1953, angkatan VI tahun 1955, angkatan VII pada tahun 1956 dan angkatan VIII pada tahun 1958. Mahasiswa angkatan VII mendapat sebutan "Bharata", terhitung mulai

1 Tulisan ini Dipersiapkan dalam rangka Menyambut Dies Natalies ke-64 PTIK.

2 Wik Djatmika adalah alumnus Angkatan VII "Bharata", jabatan terakhir Irwasum Polri dan sekarang pengajar pada Program S1 PTIK dan Pps. S2 KIK UI.

tanggal 1 Januari 1956, tanggal 2 Januari 1956 para calon mahasiswa sebanyak 102 orang berkumpul di halaman PTIK jalan Tambak 2, Jakarta Pusat sekarang Gedung Inkopol, untuk pelaporan dan registrasi.

Masuk dalam dunia kampus

Setelah pelaporan selesai para mahasiswa diangkut dengan truck ditutup terpal menuju Kebayoran Baru dan ditampung di asrama "Sapta Dharma" di jalan Darmawangsa, bekas asrama tersebut kini telah menjadi perumahan letaknya dekat dengan Darmawangsa Square, Kebayoran Baru. Setelah pembagian kamar bersamaan pula dibagikan pakaian seragam dari tutup kepala (pet), baju, celana, kaos oblong, celana dalam (celana kolor/pakai tali) sepatu rendah, kaos kaki, *enklets* (penutup betis seperti tentara Amerika Serikat pada Perang Dunia II) dan tanda pangkat mahasiswa yakni 3 strip kuning (pangkat komisaris polisi) untuk dipasang dileher baju dan epolet hitam bertuliskan AKADEMI dengan 1 strip. Pada masa itu PTIK dikenal sebagai sekolah calon Komisaris Polisi.

Acara kegiatan pertama adalah masa pengenalan kampus yang saat itu lebih dikenal dengan nama "perploncon" tetapi secara resmi disebut "pembayatan" – dari kata "ba'iat" artinya disumpah – yang memakan waktu hampir 2 minggu dengan perkuliahan tetap berjalan. Perkuliahan diadakan di kampus PTIK, di jalan Tambak 2 sekarang digunakan kantor Inkopol, di kampus Universitas Indonesia (UI) di jalan Salemba, Jakarta Pusat dan di kampus Akademi Hukum Militer (AHM) dekat Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Para mahasiswa berasal dari pelbagai daerah dan terdiri dari anggota Polri aktif dan dari umum.

Sebagian besar pengajar berasal dari Universitas Indonesia, dan beberapa dari perguruan lain atau pakar suatu disiplin ilmu. Pada rencana pengajaran untuk angkatan VII sebenarnya telah diputuskan adanya jurusan "teknologi" kepolisian dengan diberikan kuliah ilmu kimia yang diselenggarakan di fakultas kedokteran UI tetapi kemudian tidak diteruskan karena para mahasiswa angkatan VII berasal dari berbagai jurusan yaitu SMA bagian A (sastra), bagian B (pasti) dan bagian C (ekonomi) dan hanya bagian B dan C yang pernah mendapatkan ilmu kimia dan bagi yang berasal dari bagian C-pun hanya kimia untuk pengenalan benda-benda tertentu seperti air – H₂O, garam – NaCl dan sebagainya untuk keperluan praktis.

Organisasi PTIK.

PTIK adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan, kesan penulis merupakan lembaga yang langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara (KKN/Kapolri). Karena tidak langsung dibawah struktur Bagian Inspeksi Pendidikan atau Bagian lainnya. Kala itu Polri masih berstatus Jawatan struktur organisasinya masih sederhana terdiri dari bagian-bagian, seperti Bagian Inspeksi Daerah sekarang Irwasum, Bagian Inspeksi Mobiel Brigade dan

seterusnya, kecuali Reserse Kriminil yang disebutnya dinas, demikian pula intelijen yang pada waktu itu disebut Dinas Pengawas Keamanan Negara (DPKN).

Struktur organisasi PTIK terdiri dari Dekan dan Sekretaris Dekan yang juga sebagai sekretaris Dewan Guru Besar. Bidang administrasi dipimpin seorang administratir membidangi urusan ketatausahaan, urusan kemahasiswaan, urusan logistik dan keuangan serta mengawasi urusan pendidikan seperti perkuliahan, ujian dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Ada jabatan yang kesan penulis merupakan jabatan tetap yakni "pedel", yakni pejabat penuntun prosesi apabila ada kegiatan Dies Natalis yang dijabat oleh KP k. II R. Suroyo, mengapa penulis mengatakan demikian karena selama 3 kali penulis alami dan konon sebelumnya tugas pedel selalu dilaksanakan oleh KP. Tk. II R. Suroyo, sehingga beliau dikenal dengan "Suroyo pedel".

Sekretaris PTIK dijabat oleh KBP. tk. I R. Subarkah yang masih menjabat Kepala Bagian Inspeksi Pendidikan DKN, sedang administratir dijabat oleh KP. tk. I Drs. Otot Syamsulma'arif, alumnus angkatan III PTIK. Struktur organisasi PTIK masih sederhana untuk mengelola mahasiswa angkatan IV, angkatan V, angkatan VI dan angkatan VII yang berjumlah kurang dari 300 orang mahasiswa. Jumlah tersebut berkurang pada tahun-tahun berikutnya dan ditambah dengan asupan mahasiswa baru.

Status mahasiswa

Mahasiswa yang berasal dari umum diangkat dengan pangkat Ajun Inspektur tk. I (AIPtu) dengan catatan tugas belajar di PTIK, sedangkan bagi yang praktek tetap kecuali yang berpangkat dibawah AIPtu disesuaikan pangkatnya dengan pangkat mahasiswa yang berasal dari umum. Dengan gaji penuh dan setiap kenaikan gaji berkala ikut mendapatkan kenaikan demikian juga tunjangan-tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Disamping itu setiap naik tingkat mendapatkan kenaikan pangkat, jadi setelah meraih tingkat kandidat I naik menjadi Inspektur Polisi tk. II (IPda), kandidat II menjadi IPTu, doktoral I menjadi Ajun Komisaris Polisi dan terakhir setelah menamatkan doktoral II menjadi Komisaris Polisi tk. II.

Dalam kehidupan kampus ada perhimpunan mahasiswa, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Kepolisian (PMIK). PMIK pada tahun 50-an sangat berperan dalam kehidupan kemahasiswaan baik di Jakarta maupun secara nasional. Ketua PMIK (Basirun Nugroho, angkatan VIII) sempat menduduki jabatan Ketua Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI). Penulis sendiri bersama-sama dengan teman lainnya banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti Pekan Kesenian Mahasiswa dalam lingkup Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia (BKSKMI), Pekan Olah Raga Mahasiswa (POM) – yang diikuti sejak tahun 1956 di Bandung, tahun 1958 di Yogyakarta, tahun 1960 di Medan – disamping beberapa mahasiswa, termasuk penulis, membantu redaksi jurnal PTIK yakni majalah Bhayangkara.

Mata kuliah

Mata kuliah yang diberikan, sesuai dengan tujuan institusional pada saat dibentuknya Akademi Polisi adalah untuk menghasilkan kader (perwira) polisi yang berwawasan ilmiah disamping itu sesuai tujuan instrumental yakni pengetahuan yang diperlukan dalam praktek kepolisian, baik yang bersifat praktis seperti daktiloskopi, pemotretan, kriminalistik dan yang bersifat keilmuan. Beberapa ilmu sosial seperti ilmu Negara, ilmu hukum, sosiologi, ilmu hukum antar golongan (*intergentielrechts*), hukum adat (I), hukum administrasi (*administratie rechts*), hukum tatanegara, hukum pidana, hukum acara pidana. Ilmu budaya (*humaniora*) seperti hukum adat (II), kebudayaan. Ilmu alam seperti toksikologi, kedokteran kehakiman (*gerechtelijke geneeskunde*).

Mata kuliah pada kurun waktu 1956 – 1961 lebih berkonsentrasi kepada ilmu hukum, karena untuk kebutuhan di lapangan yang didukung dengan ilmu pengetahuan lainnya tentang peri kehidupan masyarakat seperti kebudayaan, adat, yang dapat mewarnai bentuk dan macam kriminalitas, sesuatu yang selalu dihadapi oleh polisi di daerah yang masyarakatnya beragam budaya.

Buku-buku wajib masih banyak berbahasa asing terutama bahasa Belanda dan Inggris bahkan bahasa Jerman! Penulis terpaksa kursus bahasa Belanda tetapi untuk bahasa Jerman menyerah! Buku-buku tersebut dapat dibeli dengan setengah harga pada toko-toko buku tertentu seperti toko buku Gunung Agung, toko buku Pembangun dan toko buku Indira. Dirasakan sangat meringankan dan diperhatikan benar-benar oleh pemerintah.

Ujian-ujian dilaksanakan bagi mata kuliah yang sudah selesai diberikan. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib seperti ilmu hukum pada umumnya, mata kuliah pendukung antara lain sosiologi, kebudayaan/antropologi dan lainnya dan mata pelajaran pelengkap seperti persenjataan, pemotretan, daktiloskopi. Untuk mata kuliah wajib ujiannya disebut “examen”, bila dilaksanakan ujian lesan mengenakan seragam PDUB (pakaian dinas upacara besar) yakni jas dan dasi. Pelaksanaan “examen” adalah bila examen pertama gagal, tidak lulus, diberikan kesempatan mengulang hanya satu kali. Hasil terakhir tetap menjadi acuan untuk kelulusan seluruh ujian mata kuliah. Untuk mata kuliah pendukung ujiannya disebut “tentamen”, apabila gagal pada ujian pertama maka ujian kedua menjadi “examen” hasil akhir yang diperoleh menjadi acuan untuk pertimbangan kelulusan. Sedangkan ujian atau tes untuk mata pelajaran pelengkap seperti persenjataan, pemotretan, daktiloskopi disebut “testimonium”.

Pada dekade 50-an dikenal adanya kebijakan “drop out” dan “drop in”. “Drop out” dilakukan bagi mahasiswa yang gagal memperoleh nilai minimal dan dikeluarkan dengan pangkat yang disandang untuk bertugas di Polri. Sedang yang dikenai “drop in” diturunkan untuk mengikuti kuliah bersama angkatan dibawahnya. Oleh karena itu pada decade 50-an tersebut mahasiswa angkatan III yang gagal dan masih dapat meneruskan kuliahnya

bersama angkatan IV, demikian juga mahasiswa angkatan IV “turun” menjadi mahasiswa angkatan V. Kecuali ada kasus khusus seorang mahasiswa angkatan IV “*drop in*” menjadi mahasiswa angkatan V kemudian karena mendapat kecelakaan pada waktu melawan perampok sehingga mengalami luka-luka yang berakibat tidak dapat mengikuti kuliah dan ujian maka di-“*drop*” ke angkatan VI.

Sistem pendidikan

Angkatan VII adalah angkatan terakhir “sistem lama”, tetapi para Pembina telah mempersiapkan dengan sistem baru yakni sistem bakaloreat kemudian dibatalkan dan kemudian diberlakukan pada angkatan VIII, 1958, oleh karena itu angkatan VII mendapatkan tambahan kurikulum disamping yang disampaikan dalam perkuliahan, diadakan tambahan latihan lapangan yang disebut “latihan kawiryan” dan dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) di Sukabumi selama 1 bulan pada tahun 1958 setelah menyelesaikan tingkat persiapan untuk melanjutkan ke tingkat kandidat. Latihan yang juga dikenal sebagai “dinas lapangan” ini dikhususkan untuk para mahasiswa yang berasal dari umum dan mahasiswa yang berpangkat dibawah IPda pada saat masuk PTIK. Latihan lapangan dilaksanakan di daerah Sukabumi utara dan selatan, dikenal juga sebagai latihan “manuver”, latihan mengendarai motor (*motor rijden*) roda 2 dan roda 4 serta pengetahuan tentang mesin mobil.

Pada tahun yang sama diadakan detasering (*detachering*) yang dikenal juga dengan istilah “kumandah” dalam waktu 2 bulan. Sistem tersebut dapat dikatakan sebagai “kuliah praktek” untuk lebih mengenal organisasi Polri terbawah. Detasering dilaksanakan dalam wilayah Kepolisian Karesidenan (Polwil) Bogor meliputi wilayah-wilayah Kepolisian Kabupaten (Polres) Bogor, Cianjur dan Sukabumi dan ditempatkan di sector-sector kepolisian. Beberapa daerah di kabupaten Cianjur dan Sukabumi masih berkelieran gerombolan separatis DI/TII.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Para pengajar

Para pengajar PTIK dalam dekade 50-an disamping sebagai pakar (*scholar*) dimasing-masing disiplin ilmunya juga merupakan tokoh nasional dan pemerintahan. Sebagai contoh, jabatan Prof. Djokosutono disamping sebagai Dekan PTIK juga Dekan Fakultas hukum dan ilmu kemasyarakatan (cikal bakal Fakultas ilmu sosial dan Politik) Universitas Indonesia (UI). Beliau menjadi penasihat Presiden dan penasihat militer karena telah berjasa membangun Akademi Hukum Militer (AHM). Sebagai ilmuwan berpengaruh dalam perkembangan hukum nasional. Hampir semua pejabat Negara baik sipil, militer/TNI dan Polri serta “pejabat non pemerintah” seperti para advokat, politisi adalah hasil didik Pof. Djokosutono. Prof. Dr. Priyono disamping sebagai pejabat Dekan Fakultas Sastra UI juga pernah menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan

Kebudayaan, Prof. Dr. Hazairin pernah menjadi Menteri Dalam Negeri demikian pula Prof. Satochid Kartanegara sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Profesor lainnya, tetapi tidak memberi kuliah angkatan VII tetapi mengajar di angkatan IV dan V, antara lain Prof. Dr. Supomo konseptor UUD 1945, mantan Menteri Kehakiman, mantan Dubes RI pada Kerajaan Inggris dan Dekan pertama PTIK. Demikian pula Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo seorang ekonom pernah menjabat Menteri Perekonomian mengajar di angkatan IV dan V.

Penulis baru mengetahui “ampuh”-nya Prof. Djokosutono pada tahun 1965 – setelah tamat PTIK – yakni pada wafatnya Prof. Djokosutono. Kebetulan penulis sedang berada di Jakarta mengikuti kursus peradilan karena terhadap Polri telah diberlakukan hukum militer. Pada upacara membawa jenazah Prof. Djokosutono penulis sempat memanggul kerandanya dari rumah duka menuju mobil jenazah bersama-sama dengan beberapa perwira dari AHM. Pada saat pembacaan riwayat hidup dalam upacara pemakaman di TMP Kalibata, ternyata Prof. Djokosutono sebelum jadi Profesor telah menjadi asisten professor dari beberapa mata kuliah seperti ilmu negara, hukum tatanegara, sosiologi, hukum adat, ilmu politik, hukum internasional dan beberapa lagi, yang mungkin untuk masa sekarang agak sulit mencari bandingannya. Pejabat, dosen yang pernah mendapat kuliah dari Prof. Djokosutono sebelum tahun 1965 pasti dapat menceritakan pengalamannya dengan ilmu pengetahuan yang telah diberikan Prof. Djokosutono bagi masing-masing tugas atau jabatannya seperti sebagai pejabat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat bahkan para politisi.

Dalam suatu kuliahnya pernah Prof. Djokosutono menceritakan bahwa sebutan “Pemimpin Besar Revolusi” bagi Presiden Sukarno adalah hasil pemikiran dan paparannya didepan para anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dengan menganalogi revolusi yang dilakukan oleh Willem III, raja Belanda, melawan kolonialisme Spanyol yang menjajah Belanda.

Tokoh lainnya adalah Prof. DR. Priyono sebagai dosen islamologi di PTIK juga adalah Dekan Fakultas Sastra UI (sekarang fakultas Ilmu Budaya). Demikian pula dengan Prof. DR. Hazairin pakar Hukum Adat, yang juga sebagai seorang politisi dari Partai Indonesia Raya dan sempat menjadi Menteri Dalam Negeri dan pernah menjadi Dekan PTIK. Tokoh lain yang layak dikenang adalah pengajar Hukum Pidana Prof. Satochid Kartanegara “spesialis” hukum pidana teori maupun praktek karena Prof. Satochid Kartanegara adalah juga Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Teori-teori hukum pidana banyak bersumber dari referensi para ahli hukum pidana Belanda.

Tak lupa juga pengajar yang paling menonjol dari internal Polri adalah KBP tk.I R. Subarkah. Sebutan “tingkat I” adalah akibat adanya kebijakan *herschikking* (penyesuaian) pada tahun 1954. Pada masa itu usulan kenaikan gaji Polri tidak diterima oleh Pemerintah,

karena Polri adalah golongan pegawai sipil, oleh karena itu upaya untuk kenaikan gaji dengan jalan menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dengan tanda pangkatnya tidak berubah seperti semula hanya penyebutannya dengan menyebut pangkat lebih tinggi satu tingkat. KBP. tk. I Subarkah terkenal juga dengan konsepnya tentang pembenahan organisasi Polri, menyarankan adanya kepangkatan diatas KBP atau istilah sekarang Perwira Tinggi yaitu setelah pangkat KBP kemudian Brigadir Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal. Istilah Direktur Jenderal berkaitan dengan kedudukan Polri pada saat itu sebagai Jawatan. Pemikiannya tersebut terkenal dengan "Nota Subarkah".

Akhir tahun 1961 pendidikan untuk mahasiswa angkata VII dapat diselesaikan dengan baik. Sambil menunggu pelantikan dan penempatan diisi dengan mengikuti kegiatan pada pekan olah raga Asian Games 1962 yang diselenggarakan di Jakarta. Selanjutnya setelah pelantikan menjadi Komisaris Polisi tk. II teman-teman ditempatkan di Nangroe Aceh Darussalam di barat sampai Papua di timur serta di Sulawesi Utara di utara sampai di Maluku Tenggara di selatan sejumlah 96 orang.

Penutup

"Kisah" ini untuk menyambut PTIK yang telah berumur 64 tahun atau "delapan windu". Perjalanan jauh yang telah menghadapi halangan dan rintangan telah dapat dilewati dengan selamat, bahkan pernah pada tahun 1980 ada perintah agar PTIK dibubarkan dengan alasan bahwa sistem pendidikan ABRI tidak mengenal pendidikan tinggi. Namun perintah itu dapat diabaikan dan PTIK berjalan terus berdampingan dengan Universitas Indonesia yang secara historis telah ikut memupuk kelangsungan PTIK dengan para profesornya bahkan sejak 64 tahun yang lalu.

Kini PTIK telah mempunyai fasilitas yang cukup memadai sesuai jamannya tinggal mengisi dan mengelola dengan lebih baik. Diharapkan PTIK tidak hanya membuat dan menghasilkan mahasiswanya sebagai orang "pinter" tetapi juga dapat membuat hasil didiknya menjadi orang atau pejabat yang mempunyai wawasan luas penuh inovasi, mampu menganalisa problema dengan kritis dan analitis serta menghindari hal-hal yang bersifat rutin untuk dapat terus mengembangkan profesinya dalam memetakan masa depannya dengan memahami perjalanan sejarah profesinya. Sehingga lembaga ini akan benar-benar menjadi lembaga yang dibanggakan oleh alumnusnya dan oleh masyarakat luas.

PTIK diharapkan dapat membangun "dunia civitas academica" yang terdiri dari para pengajar, staf lembaga, para mahasiswa dan para alumni untuk memperoleh masukan-masukan tidak hanya dari referensi (*reference*) tetapi juga pengalaman (*experience*) khususnya dari para alumnusnya untuk dapat mengembangkan baik sebagai bahan pertimbangan kebijakan atau memunculkan metode baru bahkan dapat melahirkan ilmu baru. (*)